

Koalisi

Sebagian besar suara pemilih telah masuk ke TNP. Kalau merujuk hasil perhitungan TNP saat ini kita bisa mengatakan pasangan SBY-Yusuf Kalla dan Megawati-Hasyim Muzadi yang masuk ke putaran kedua. Tiga pasangan lain kandas sudah.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana basis dukungan kedua pasangan petarung yang tersisa tersebut untuk menghadapi putaran kedua, 20 September nanti. Dalam hal ini bagaimana parpol atau koalisi parpol akan mendukung mereka.

Memang pemilu putaran kedua nanti tetap secara langsung, artinya rakyat tak diperantari dalam menentukan jagonya. Kendati demikian bukan berarti partai sudah tak berperan lagi. Meski dalam derajat yang jauh berkurang seperti yang kita lihat pada putaran pertama, parpol tetap akan menjadi mesin politik penyedot massa. Terutama parpol berbasis tradisional atau yang garis ideologinya tegas.

Maka kita perlu mempertanyakan: dari ketiga pasangan yang kandas tadi siapa yang akan dirangkul pasangan SBY-Kalla dan Mega-Hasyim serta konsesi apa yang mereka siapkan untuk itu. Lalu bagaimana dengan parpol peserta pemilu legislatif yang tak masuk dalam koalisi pendukung pasangan Capres-Cawapres—akan mereka gandengkah? Kalau ya yang mana saja dan apa syarat serta konsesi untuk mereka?

Basis dukungan ini mereka perlukan tak hanya untuk pilpres tapi juga setelah itu. Setelah menjadi presiden yang terpilih itu harus berhadapan dengan parlemen. Kalau dukungan untuk dia di parlemen tak kuat, ia akan bermasalah. Parlemen yang sekarang jauh lebih kuat setelah UUD '45 diamandemen. Kini banyak hal yang harus mendapat persetujuan parlemen sebelum bisa dijalankan oleh pemerintah. Nestapalah yang akan dijelang presiden baru itu kalau dukungannya tak kuat di parlemen. Karena itu koalisi menjadi penting baginya. Pertanyaannya sekarang akan berkoalisi dengan siapakah dia? Dengan sembarang kekuatankah dengan motif yang pragmatis atau oportunist? Atau, ia juga akan senantiasa memperhatikan aspirasi rakyat banyak yang menghendaki pemerintah yang bersih dan berwibawa? Kalau yang pertama yang ia pilih, cilakalah dia. Karena dia berkhianat.

Temu Dengar TI KPU Onno W Purbo Pun Geram



Hearing TI KPU

"Saya berdiri di sini untuk membela 17 ribu anak-anak saya. Saya telah mendidik mereka, dan mereka bekerja keras untuk pemilu ini. Saya tidak rela hasil kerja keras mereka dilecehkan." Getaran geram itu menggelegar.

Si empunya suara tadi malam itu Onno W. Purbo. Ia menjadi pembicara dalam dengar pendapat tentang sistem TI KPU di Pusat Tabulasi Nasional Pemilu di Hotel Borobudur kemarin malam. Dia tampil bersama Chusnul Mar'iyah (KPU), Basuki Suhardiman (KPU), Rahmat Zikri (KPU), Mahmur Suriadiredja (Telkom), dengan moderator Erwin Ramedhan (Kantor Menko Ekuin).

Yang dibela Onno adalah para petugas *data entry* yang tersebar di sebagian besar kecamatan di negeri ini. Harus memasukkan data hasil pemilu ke dalam sistem komputer KPU, mereka adalah para siswa SMK, guru, mahasiswa. Mereka telah bekerja keras selama ini meng-*input* hasil pemilu dari setiap TPS di seluruh Indonesia. Sampai pagi ini, para petugas itu telah menginput lebih dari 103 juta suara dalam proses pemilihan presiden (Pilpres) putaran pertama ini. Berstatus sukarelawan, mereka mendapatkan sejumlah pelatihan untuk bisa melakukan tugas tersebut. Onno W Purbo adalah orang yang dengan tekun mendidik

para sukarelawan tersebut, baik secara langsung dalam tatap muka maupun melalui mailing list “dikmenjur”.

Mengapa Onno tampak berang? Dia merasa ada yang melecehkan hasil jerih payahnya. Secara terang dia menyebut nama Roy Suryo, yang pernyataannya dikutip harian *Kompas* Senin 12 Juli. Mengawali komentarnya, Onno mengatakan pernyataan Roy Suryo tidak pada tempatnya. “Sori Roy, metodologimu itu salah dan datamu lemah,” tegas dia.

Sebelumnya Roy Suryo memang banyak dikutip oleh media massa ketika dia mengatakan ada sejumlah kegagalan dalam tampilan data IT KPU. Bahkan, menurut dia, ada sejumlah data misterius yang “nyelonong” masuk ke komputer KPU. Dengan kondisi seperti itu, menurut dia, penggunaan TI di KPU justru menjatuhkan citra TI di tanah air.

Mengomentari hal itu, Onno mengatakan bahwa Roy membidik sasaran tembak yang salah. “Data KPU adalah data yang terus berubah. Karena itu perubahan justru harus selalu terjadi. Kalau Roy mau mempersoalkan TI KPU, bandingkan data yang ada di komputer itu

dengan data di setiap TPS. Kalau ada perbedaan, ada satu prosedur yang sudah disepakati untuk membenarkan data yang ada di komputer,” kata Onno.

Dalam kelanjutan dengar pendapat, Roy Suryo angkat bicara. Dia menyangkal pernyataan Chusnul Mar’yah bahwa dia berbicara tidak berdasarkan data.

“Saya bawa datanya, semuanya saya *print* dalam format HTML. Siapa boleh melihat. Jadi saya punya data,” kata Roy sembari mengatakan lagi bahwa data yang dimilikinya adalah data jumlah kecamatan yang salah serta data hasil dari satu kecamatan yang nyelonong masuk.

Tidak hanya itu yang dikatakan Roy. Dia juga mempertanyakan “Kang Onno”, yang malam ini tampil tidak seperti Kang Onno yang dia kenal. Tidak sangat spesifik apa yang dimaksud Roy Suryo, tetapi tampaknya Roy heran



mengapa Onno “membela KPU”. Karena dipertanyakan dengan cara seperti itulah suara Onno kembali menggelegar, “Saya datang kemari demi 17.000 anak-anak saya yang bertugas meng-entry data. Saya tidak rela kerja keras mereka dilecehkan.”

Onno masih menambahkan, Roy Suryo sudah salah di tingkat metodologi. Roy mempersoalkan perubahan, padahal justru perubahan adalah esensi data komputer KPU. Karena itu sudah tidak ada gunanya lagi berbicara mengenai data yang sudah diprint oleh Roy Suryo.

Onno selama ini memang dikenal sebagai orang yang memperjuangkan pasyarakatatan teknologi informasi di tanah air. Lulusan ITB yang

Onno mengatakan bahwa Roy membidik sasaran tembak yang salah.

mendapatkan gelar master dan doktor di Kanada itu giat mempromosikan teknologi informasi di tanah air melalui berbagai forum. Dia aktif di sejumlah *maling list* telekomunikasi dan internet di tanah air. Dari *posting-postingnya* terlihat bahwa dia berjuang begitu gigih di bidang itu. Pertanyaan-pertanyaan teknis “bodoh” dijawabnya dengan begitu santun, dengan cara yang sederhana, sehingga orang tidak enggan bertanya kepadanya.

Tetapi jangan coba menjadi penghalang perjuangannya. Siapa pun Anda, dia tidak akan segan-segan melawan. Salah satu perjuangan kerasnya adalah bagaimana membebaskan frekuensi 2,4 GHz untuk bisa dipakai untuk kepentingan umum. Di berbagai negara maju, frekuensi ini adalah frekuensi



yang bebas dipakai oleh masyarakat. Pada jalur inilah internet nirkabel bisa ditempatkan, dengan harga yang sangat murah dibanding dengan Internet melalui jalur kabel telepon atau serat optik. Dengan internet murah, menurut dia, anak-anak bangsa akan bisa belajar banyak hal dari berbagai sumber yang tersedia secara gratis pada jaringan internet di seluruh dunia.

Tetapi dalam kenyataannya di Indonesia frekuensi ini tidak bisa dengan bebas dipakai oleh masyarakat. Dirjen Postel menyatakan bahwa perlu ada aturan-aturan dalam pemakaian frekuensi ini, karena pemakaian secara bebas akan mengganggu sistem komunikasi yang sudah ada. Karena itu, bukan

hanya mengeluarkan aturan, pemerintah juga melakukan sweeping atas perlatan 2.4 GHz.

Aturan ini membuat Onno kontan berteriak. Dia menulis surat kepada Dirjen Postel Djamhari Sirat memprotes “kebijaksanaan” itu. Tidak hanya itu, dia juga menulis dengan keras di harian Kompas, bahwa pemerintah telah menipu rakyat. Dalam satu advertorial dijelaskan seolah-oleh pemerintah membebaskan frekuensi itu, tetapi pada kenyataannya pemakaian frekuensi itu “harus dengan izin”.

Itulah Onno. Tampaknya yang menjadi obsesinya adalah “demokratisasi” dalam bidang telekomunikasi, demi kepentingan masyarakat seluas-luasnya. Jadi, jangan coba-coba menjadi lawan perjuangannya. ■

SWARA

Pasang Surut Hubungan Presiden-Parlemen

Apakah pemerintahan akan berjalan dengan efektif, jika tidak didukung oleh suara mayoritas partai di parlemen? Ini pertanyaan klasik yang selalu diajukan di negara-negara demokratis, ketika ada hubungan yang seimbang antara kelembagaan eksekutif di satu pihak, dengan lembaga legislative di lain pihak.

Berkaca dari hubungan yang terjadi selama sejarah pemerintahan di Indonesia, maka Tabulasi Nasional Pemilu mengangkat topik ini sebagai bahasan dalam diskusi 13 Juli 2004 siang. Tampil sebagai pembicara adalah Satya Arinanto, pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, lalu Teras Narang, anggota DPR dari PDIP, Yudi, dari tim sukses Wiranto, serta Indra J. Piliang, pengamat politik dari CSIS.

Teras Narang yang menjadi anggota DPR dari partai pemenang pemilu 1999 mengatakan bahwa perolehan suara yang saat ini terjadi dimana Partai Golkar menjadi pemenang pemilu legislative, sementara Partai Demokrat yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden putaran pertama, maka situasi politiknya menjadi menarik untuk diamati di masa mendatang. Dari pengalamannya sebagai anggota DPR, ia menilai bahwa tarik menarik pengaruh antara DPR dan



Menyoal Hubungan Presiden dan Parlemen

presiden terjadi dalam pembahasan APBN, RUU, Perpu dan kebijakan-kebijakan lainnya.

“Dalam RUU Pemilu, misalnya terlihat sekali bagaimana kepentingan DPR dan Presiden, saling tarik menarik. Tapi inilah proses politik.” Katanya. Mengomentari pertanyaan moderator, P. Hasudungan

“Dalam RUU Pemilu, misalnya terlihat sekali bagaimana kepentingan DPR dan Presiden, saling tarik menarik. Tapi inilah proses politik.”

Sirait, tipe presiden ideal macam apa yang lebih dipilih oleh DPR, Teras mengatakan bahwa tipe ideal itu diserahkan kepada masyarakat, karena sekarang masyarakatlah yang memilih langsung presidennya. Presiden Megawati, yang berasal dari partai yang sama dengan Teras, dikomentarkannya sebagai presiden yang berhasil menata kehidupan masyarakat, baik dalam soal ekonomi, dan keuangan. “Prestasi Megawati itu bisa diterima oleh DPR, terutama karena ia telah menata keamanan di negeri ini.” Katanya sembari memberikan catatan, bahwa Megawati baru menjabat sebagai presiden sejak bulan Agustus 2001.

Memang relasi antara pemerintah dan parlemen di masa kepemimpinan Megawati ini lebih stabil, ketimbang di masa kepemimpinan Abdurrachman Wahid. Namun pengamat politik, Indra J. Piliang, jika disuruh memilih, ia lebih memilih masa kepemimpinan Gus Dur sebagai pilihannya. "Memang keduanya tidak ideal, tapi kalau disuruh pilih, saya pilih jaman Gus Dur." Ia menilai bahwa pada jaman Megawati ini, ada komitmen politik antara Megawati, Akbar Tanjung, dan Amien Rais untuk tidak mengganggu pemerintahan yang berkuasa. Indra pun mencatat bahwa di jaman Gus Dur memang hubungan pemerintah dan DPR terasa buruk, "Tapi di situ ada transparansi. Hal-hal yang kontroversial dibuka kepada publik untuk dibahas. Pada jaman Megawati hal ini tidak terlihat, terutama untuk soal-soal yang substansial."

Indra juga menilai bahwa dalam pembahasan beberapa RUU kemudian persetujuan antara Gus Dur dan parlemen ini dimasukkan di dalamnya. "Jadi sesuatu yang personal kemudian dibawa-bawa ke dalam system." Mengakhiri paparannya, Indra mengatakan bahwa inilah problem yang ditinggalkan oleh Gus Dur, bahwa institusionalisasi demokrasi tidak jalan dengan baik, bahkan belum sepenuhnya jadi.

Dosen hukum tata negara dari FH UI, Satya Arinanto,

...hubungan antara presiden dan parlemen yang harmonis, adalah hal yang diperlukan.

mengatakan bahwa hubungan antara DPR dan pemerintah yang berubah ini – misalnya jika dibandingkan dengan masa Orde Baru – adalah hasil dari perubahan konstitusi dengan adanya amandemen terhadap UUD 45. "Ada pembesaran kewenangan DPR, ada pembagian kewenangan antara DPR dengan Mahkamah Konstitusi. Memang ada dinamika yang menarik kemudian. DPR memang cenderung memperkuat diri lewat konstitusi." Katanya lagi. Bagaimana pun juga bagi Satya perkembangan ini menuju pada arah check and balances yang dilakukan antar lembaga-lembaga politik yang ada, dan hal ini positif maknanya, agar kita makin menuju negara yang demokratis.

Yudi dari partai Golkar, mengungkapkan bahwa hubungan antara presiden dan parlemen yang harmonis, adalah hal yang diperlukan. "Jika ada kerjasama yang baik, maka keduanya bisa berjalan dengan baik pula." Namun begitu, Yudi memberikan sejumlah catatan bahwa anggota DPR yang sekarang, masih belum memaksimalkan fungsinya, dengan

menggunakan hak angket, budget, interpelasi dan lain-lain.

Karena saat ini sudah tidak ada lagi Garis Besar Haluan Negara (GBHN), maka platform politik partai yang dijadikan acuan apakah garis kebijakan yang dibawa oleh presiden, sebagai ukuran kinerjanya. Yudi kembali menekankan perlunya keseimbangan antara kelembagaan legislative, eksekutif dan yudikatif, namun buru-buru ia menambahkan bahwa dalam saat sekarang, kelembagaan yudikatif terasa masih mengambang.

Bagaimanapun juga kelembagaan seperti DPR dan presiden adalah kelembagaan politik, dimana di dalamnya terjadi pertarungan kekuasaan, saling beradu kepentingan, dan disarankan oleh Yudi agar, partai yang kalah dalam pemilu, baiknya menjadi oposisi terhadap pemerintahan yang ada, sehingga bisa menjadi lembaga kontrol kebijakan. Dengan berjalannya proses ini maka, proses demokratisasi di Indonesia akan semakin terasa.

Harmonis atau tidaknya hubungan presiden dan DPR ke depan, akan sangat tergantung dari kepentingan-kepentingan yang ada, dan tarik menarik kepentingan seperti itu adalah hal biasa, demikian dikatakan oleh Satya Arinanto. "Yang penting fungsi kontrol dari DPR jalan, dan jangan sekedar mempertahankan hubungan yang harmonis. Dan jangan lupa akan lembaga DPD yang mulai pemerintahan depan akan mulai berjalan." Katanya lagi. ■

Profil

Fakhrurrozi Asnawi, Tamu Tetap TNP

Sosoknya mudah ditandai. Tubuhnya tinggi, badannya tidak kurus, tidak tambun. Berpakaian rapi. Ada kalanya ia berjas lengkap, namun biasanya berkemaja panjang tangan dengan pentalon saja. Kalau berbicara, kesan sangar sirna dari wajahnya sebab ia rajin tersenyum. Terlepas dari semua itu, jenggotnya yang maha lebat itulah yang menjadi pertanda penting dirinya.

Ada beberapa orang yang menjadi pengunjung tetap Tabulasi Nasional Pemilu (TNP) sejak pemilu legislatif April lalu. Saban hari mereka datang dan menghabiskan diri di Ruang Flores, Hotel Borobudur. Acap kali keberadaan mereka sejak TNP dibuka sampai diakhiri. Ada kesamaan di antara mereka, yaitu selalu antusias mengikuti diskusi. Rajin mereka bertanya atau berkomentar. Seperti tak lelah atau jemu. Salah satu dari mereka adalah Fakhrurrozi Asnawi, lelaki berbrewok super tadi. Kalau harus dipilih pengunjung TNP yang paling setia, dia harus masuk nominasi.

Mengapa Fakhrurrozi ringan kaki datang ke TNP—tak punya pekerjaankah dia alias penganggur? Ternyata tidak. Ia punya pekerjaan. Ia acap hadir karena sangat menikmati atmosfir politik. “Hobiku seperti ini, datang ke ajang politik. Sejak kecil aku memang sudah suka politik dan berpolitik. Aku ini

orang organisasi,” ucap suami Nelly Zainab dan ayah empat anak lelaki (anak sulungnya sudah mahasiswa) tersebut.

Di lingkungan TNP, Fakhrurrozi—orang yang kalau bertanya selalu tajam dan terkadang sinis—mengatakan di TNP ia bisa menyalurkan hobi. “Kita bisa memperluas wawasan di sini. Acaranya bagus-bagus. Topik diskusinya selalu menarik. Hanya saja masih ada kurangnya,” tutur dia. Kekurangan yang dimaksudnya berkaitan dengan narasumber. “Tim Sukses yang ditampilkan ada kalanya bukan yang kelas tiga melainkan kelas satu. Ini kan panggung yang terhormat dan bergengsi, seharusnya para kandidat mengirimkan tim kelas satunya *dong*.”

Gandrung politik

Ada memang orang yang gandrung politik. Bagi mereka politik itu memikat karena sangat dinamis, penuh manuver sehingga merangsang adrenalin. Fakhrurrozi termasuk orang seperti itu.

Lahir di Pati, Jateng, pada 10 Januari 1954, Fakhrurrozi lulus dari Fak. Dakwah Universitas Asyrafyah Jakarta. Di masa muda ia aktif di organisasi NU. Ia pernah menjadi Ketua INU Ranting di Pati, dan Sekretaris IPNU Anak Cabang di Pekalongan. Ketika menjadi



mahasiswa di Jakarta ia bergiat di HMI. Dan sesudah menjadi sarjana ia tetap menjadi pegiat organisasi dengan menjadi Sekretaris KAHMI Jakarta Pusat (1998-sekarang) dan kepala Dep. Pembinaan Ummat KAHMI Nasional (2002-sekarang).

Kendati mencemplungkan diri sepenuhnya ke kubangan politik, Fakhrurrozi tidaklah menggantungkan hidup sepenuhnya di sana. Ia cari makan di luar. Caranya bermacam-macam. Ia pernah menjadi guru agama dan tenaga pemasaran. Saat ini, menurut dia, dirinya menjadi direktur PT Fokus Sembilan Sembilan, sebuah korporasi di bidang pemasaran. Sebagai orang politik yang bergerak di pemasaran, apakah telah terpikir olehnya untuk memasarkan pemilu sekarang atau mendatang? Alih-alih menjawab, senyum yang ia lemparkan. ■

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI

Edisi
14 Juli 2004



Suasana diskusi yang meriah



Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI



Agenda Harian Kamis, 15 Juli 2004

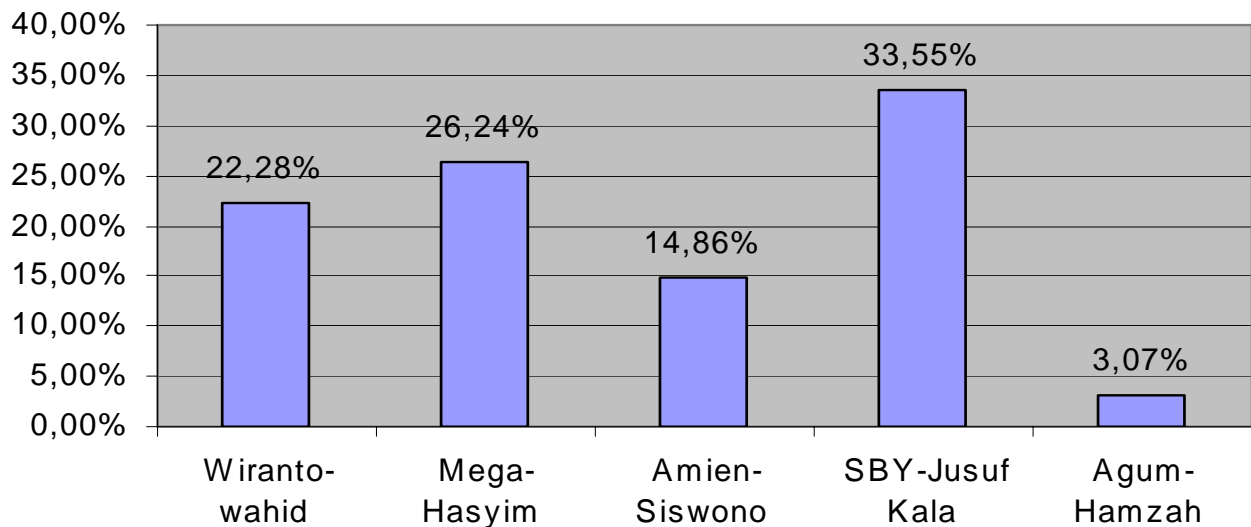
PRESS CONFERENCE: KPU

JAM 11.00 – 12.00

PENUTUPAN

JAM 12.00 – 13.00

Hasil Penghitungan Sementara



Sumber : TNP Tanggal 14 Juli 2004 jam 12:03

Alamat Redaksi :
Tabulasi Nasional Pemilu
Flores Room, Hotel Borobudur, Jakarta
Telepon : 021-3835171